



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Minta Presiden Pimpin Usaha Hadapi Perubahan Iklim
Tanggal : Kamis, 12 Desember 2019
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 29

DPR Minta Presiden Pimpin Usaha Hadapi Perubahan Iklim

Kementerian Lingkungan Hidup mendukung upaya konsolidasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim.



Budi Setyarsa
budi@tempo.co.id

JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Muhamimin Iskandar, mengusulkan agar Presiden Joko Widodo memimpin langsung usaha mengatasi perubahan iklim. Menurut dia, ego sektor alih Indonesia masih tinggi, yang membuat isu lingkungan ini belum menjadi perhatian utama masyarakat.

"Kalau Presiden yang memimpin, koalisi di akhir iklim menghadapi perubahan iklim ini menjadi lebih cepat," kata Muhamimin dalam sesi pertama Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP25, di Madrid, Spanyol, Rabu pagi waktu setempat.

Menurut Muhamimin, tantangan perubahan iklim belum menjadi agenda masal di Indonesia. Isu ini hanya menjadi perhatian kelompok terbatas. Ia menyatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahkan sering mengeluhkan

rendahnya perhatian badan legislatif daerah dalam isu penting ini.

Ia menilai ada dua penyebab isu perubahan iklim kurang mendapat perhatian. Pertama, akibat pendidikan dan sistem informasi yang belum banyak menyentuhnya. Di kelompok muda perkotaan, kata dia, bisa jadi informasinya lebih diterima dari pada yang lain. Penyebab kedua, terlalu banyak isu

yang muncul di Indonesia. "Sekarang saja yang lagi ramai isu masa jabatan presiden tiga kali," ujarnya sambil tertawa.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini menyatakan, peran legislasi dalam mendorong perubahan iklim agar menjadi isu publik sangatlah penting. Sinergi berbagai kelompok strategis perlu dikonsolidasikan. Menurut dia, penyelenggaraan

COP13 di Bali sebenarnya bisa dijadikan momentum. "Sayangnya, momentum ini lenyap begitu saja dengan berbagai sebab," ujarnya.

Pengalokasiannya anggaran untuk menghadapi perubahan iklim juga merupakan peran penting lembaga legislatif. Perwakilan Rakyat, baik pusat maupun daerah, disebut Muhamimin harus memberikan alokasi yang cukup. Apalagi, kelom-

pok yang paling terkena dampak perubahan iklim adalah masyarakat kecil, termasuk petani.

"Melalui forum ini, saya memohon kepada Presiden Jokowi untuk memimpin langsung usaha menghadapi perubahan iklim ini," kata Muhamimin.

Ia menilai, kepemimpinan Presiden penting agar semua pemangku kepentingan segera bergerak. Pengusaha, industri, pelaku ekonomi, tokoh adat, dan kelompok lain bergerak aktif. Presiden juga bisa berperan dalam forum internasional. Berbicara dalam bahasa Indonesia, ia kemudian menyatakan, "Jangan hanya Amerika Serikat yang bisa *ngamboek* dari COP, karena kepentingannya itu teranggu. Satu kali kita bisa melakukannya jika perlu. Yang ini tidak usah diterjemahkan."

Muhamimin lalu menyampaikan penilaian di publik yang menganggap COP adalah forum negara maju untuk "mecuti" —memerintah dengan paksa—negara berkembang. Dengan diplomasi yang dipimpin Presiden, kata dia, Indonesia bisa memimpin negara berkembang untuk balik "mecuti" negara maju. "Untung kata 'mecuti' tidak ada terjemahannya. Jadi, jangan diterjemahkan," katanya, diiringi derai tawa pengunjung dari Indonesia.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Aluk Dano, menyatakan sejalan dengan perlunya konsolidasi berbagai pihak untuk menghadapi dampak perubahan iklim. ●

IKLAN

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Ruanda Agung Sugardiman (kiri). Wakil Ketua DPR Muhamimin Iskandar, pada pembukaan paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim COP25 di Spanyol, kemarin.